

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini Indonesia sedang membangun dalam berbagai bidang, khususnya pada tingkat wilayah Desa yang merupakan wilayah yang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat. Hal ini supaya mengakhiri kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti yang ditunjukkan dalam *World Social Report 2021*, perbedaan kualitas standar hidup tampaknya menjadi penyebab kesenjangan antara desa dan kota.

Hal itu yang mendorong Salah satu alasan desa menjadi fokus perhatian dalam pembangunan nasional di Indonesia. disamping itu justru karena Pembangunan pedesaan merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kurangnya sumber daya keuangan yang diyakini menghambat kemajuan pedesaan membuat pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 memulai kebijakan untuk memperkuat kualitas pembangunan pedesaan dengan mengalokasikan dana desa secara langsung dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut kebijakan tersebut, tujuan program dana desa antara lain untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, mendorong pembangunan infrastruktur

perdesaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan desa dengan menggerakkan lembaga ekonomi lokal.

Bukan hanya itu, pada beberapa tahun setelahnya sudah banyak kebijakan yang dibuat dalam penanganan masalah pedesaan yang berprioritas terutama untuk sektor pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sektor pembangunan desa berfokus pada penyediaan infrastruktur tambahan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sementara itu, supaya roda ekonomi pada desa berjalan pemerintah perlu peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan permodalan serta pengelolaan usaha ekonomi produktif, misalnya yang dikelola oleh BUM DESA dan /atau kelompok usaha bersama. Tujuan terakhir ini diharapkan dapat dicapai dengan yang menurut Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 8, pembangunan desa harus menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat desa.

Dan memang program dan strategi telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya solusi masih bersifat parsial tidak mampu menyelesaikan masalah sepenuhnya. Ketika kita bicara terkait pembangunan desa kita bisa melihat melalui fenomena BUM Desa. BUM Desa yang semestinya menjadi fasilitas penyelesaian ekonomi bagi pedesaan dalam pemanfaatan potensi desa, tetapi kenyataan data yang dikumpulkan dari 361 kabupaten di seluruh Indonesia dampak BUM Desa terhadap pembangunan pedesaan menunjukkan bukti yang lemah. Tidak hanya itu, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk

bekerja dan berusaha. disamping itu, berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan membuat mereka berbondong-bondong ke kota.

Berdasarkan fakta empiris ketimpangan antara desa dan kota berkaitan dengan kualitas hidup yang belum membaik. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, ketimpangan sosial antara desa dan kota sangat terasa. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti perbedaan dalam tingkat pengembangan ekonomi, akses terhadap sumber daya dan fasilitas, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Akibatnya kita kerap kali melihat bahwasannya masih terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan dikarenakan mereka masih melihat bahwa desa sebagai suatu wilayah yang indah, asli dan tidak tersentuh apa adanya serta miskin. Ini pun mendorong terjadinya ketimpangan sosial yakni ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ketimpangan juga menunjukkan situasi di tengah masyarakat menunjukkan adanya ketidakmerataan dan ketidakadilan (*Kesehatan Reproduksi Medis Sosial Psikologi oleh Anita Lontaan dkk.*)

Fenomena di atas juga terjadi pada provinsi NTT, ada sejumlah permasalahan yang terus membelit masyarakat, seperti kemiskinan, keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur transportasi, bahaya kelaparan, tingkat kesehatan, dan sumber daya manusia yang rendah serta laju pertumbuhan ekonomi yang lambat. Disisi lain, sekarang ini kecenderungan yang tinggi dalam urbanisasi menyasar pada kelompok usia produktif. Sehingga sektor pertanian banyak dikelola oleh petani-petani tua yang memasuki usia senja. Dalam perjalannya produktivitas marginal tenaga kerja di sektor

pertanian akan terus menerus menurun. Rendahnya produktivitas akan mengguncang harga. Akibatnya, ketidakseimbangan pun terjadi.

Pada saat yang sama, para masyarakat dan petani tua menjadi kelabakan dengan modernisasi sektor pertanian. Mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami berbagai upaya modernisasi. Alternatif yang akan dipilih tentu saja akan mengikuti sistem dan pola pertanian konvensional yang telah menjadi idiom pertanian selama ini. Dapat dipastikan bahwa kondisi pertanian NTT tidak akan mengalami banyak perubahan. Bahkan cenderung bergerak mundur. Dampaknya, akan menimbulkan implikasi yang besar diantaranya pendapatan petani semakin menurun dan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menurun.

Sebetulnya NTT merupakan daerah wilayah agraris dan sebagian besar mata pencaharian penduduk petani. Termasuk pada Kabupaten Nagekeo dan struktur wilayah daerah yang lebih kecil kecamatan dan kelurahan atau desa. Salah satunya yakni Desa Nagerawe, Kecamatan Boawae.

Desa Nagerawe ialah sebuah desa dengan jumlah penduduk total sebesar 994 jiwa dan memiliki potensi sumber daya lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial budaya. Desa ini juga memiliki BUM Desa yang bergerak dalam dua jenis usaha yakni unit usaha simpan pinjam uang dan sewa aset desa seperti kursi, teng jadi, dan molen bagi warga. Tidak hanya BUM Desa tetapi juga peraturan (PERDES) yang berguna untuk mengatur jalannya pembangunan desa diantaranya ada PERDES air minum dan Perdes penertiban ternak. Namun, desa juga

mengalami beberapa kendala dan juga belum memanfaatkan potensi sumber daya lainnya seperti pertanian dan peternakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Masih terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan desa.

Dari beberapa observasi awal (*berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Selviana Tea dan Bapak Marselinus Hoza, 26 Januari 2024*) ditemukan beberapa permasalahan meliputi :

1. Terdapat peraturan desa (PERDES) tentang keamanan ternak yang bertujuan untuk menjaga keamanan desa dan tanaman dari kerusakan akibat ternak. Namun, dalam penerapannya, PERDES ini seringkali terhambat oleh dilema keamanan ternak dan rasa kasihan. Masyarakat merasa kasihan terhadap ternak dan pemiliknya, sehingga enggan melaporkan pelanggaran PERDES. Hal ini menyebabkan keamanan desa dan tanaman terancam, serta menimbulkan konflik antar masyarakat. Dilema ini mencerminkan kompleksitas interaksi manusia-hewan dengan pertimbangan moral dan norma-norma sosial yang berlaku di desa.
2. Kurangnya diversifikasi usaha dan produk lokal. Seperti mengembangkan produk olahan wijen dan biji mente berupa kue wijen, pasta wijen, kacang rebus dan jenis cemilan lainnya. Lalu padi dan hewan sapi dan babi, hasil dari padi setelah panen berupa dedak dapat dijadikan makanan sapi dan babi. Sebaliknya kotoran hewan dapat dijadikan pupuk maupun biogas. Disisi lain juga kurangnya menerapkan sistem rotasi tanaman yang berbeda

beda yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai diversifikasi usaha, sumber daya seperti keahlian dan modal sekaligus kurangnya dorongan atau dukungan dari pihak lain. Akibatnya terjadi ketergantungan pada komoditas pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca. Dan juga Kurangnya pemanfaatan dan pemetaan potensi desa dengan mengaokomodir potensi tersebut ke BUM Desa, baik dari segi pengembangan produk, promosi, dalam meningkatkan pendapatan desa.

Maka dari itu, faktor utama terletak pada kurangnya pemahaman dan strategi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan sekaligus sesuai dengan kondisi dan situasi desa. Disamping itu, Dua poin utama dari permasalahan sentral yang dihadapi desa adalah dilema keamanan ternak dan rasa kasihan, serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa. Isu-isu ini menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan desa berkelanjutan. Untuk itu perlu menganalisis strategi pembangunan desa berkelanjutan yang terpadu dan komprehensif untuk mengatasi PERDES seperti dilema keamanan ternak, mengoptimalkan potensi desa, dan memperkuat BUM Desa. Sehingga pembangunan desa sejalan dengan pengertian Strategi pembangunan desa itu sendiri ialah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang ditetapkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berangkat dari beberapa masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti tulisan ini dengan judul **“Strategi Pembangunan Desa Nagerawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjabarkan lebih jauh Strategi Pembangunan Desa Nagerawe, inti permasalahan yang ingin diangkat penulis dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana strategi pembangunan Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo ?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelliltian ini yakni

1. Untuk mengetahui strategi pembangunan Desa Nagerawe, Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa khususnya dalam bidang strategi pembangunan desa dan juga cara dalam mengidentifikasi keseluruhan potensi-potensi dari sumber daya yang dimiliki oleh desa.
2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat membantu perangkat desa dan masyarakat di Desa Nagerawe sebagai acuan dalam pengambilan keputusan

terkait dengan mengidentifikasi keseluruhan potensi-potensi dari sumber daya yang dimiliki oleh desa dalam membantu pembangunan Desa.